

Edukasi Pentingnya Collaborative Governance Dalam Pengembangan Parawisata Lokal Pada Universitas Abdul Aziz Lamadjido (Azlam) Palu

Yulizar Pramudika Tawil¹, M. Kafrawi Alkafiah², Selfiana³, Abd. Azis Fahrial⁴

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tadulako

Email: Yulizarpramudika@gmail.com

Article History:

Received: 20 Oktober 2024

Revised: 12 November 2024

Accepted: 17 November 2024

Keywords: *Collaborative Governance*, Pengembangan Pariwisata, Leadirship

Abstract: *Salah satu daerah yang cukup potensial dari segi parawisata, menarik untuk di jadikan objek penelitian, terlebih jika di analisis dari sudut pandang pengelolaan parawisata yang berkelanjutan. Tujuan dari pengabdian ini yaitu mengidentifikasi dan menalaah proses Collaborative governance yang telah di jalankan oleh Pemerintah dan menjadi basis informasi bagi mitra untuk mendapatkan insight baru terhadap kerangka keilmuan Collaborative governance. Konsep ini melihat pengaturan sejauh mana peran Lembaga publik dan non publik terlibat dalam pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal serta metode penelitian menggunakan kualitatif. Dalam hal ini tentunya sangat diperlukan peran perguruan tinggi untuk memberikan masukan-masukan (advice) terhadap pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang-peluang pada aspek parawisata dengan menekankan koordinasi atau kolaborasi antara aktor pemerintah diberbagai SKPD dan Political Will dari pejabat daerah. Hasil pengabdian menunjukan bahwa (1) Dalam konteks pengembangan pariwisata lokal, penerapan collaborative governance di Universitas Abdul Aziz Lamadjido (AZLAM) Palu menunjukan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku industri, sangat krusial, (2) Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga menciptakan solusi yang lebih efektif dan inovatif dalam mengembangkan pariwisata local dan (3) Kerjasama yang erat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tren pariwisata, menjadikan pengembangan pariwisata lebih responsif dan relevan.*

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata merupakan agenda mendesak di Indonesia, hal ini di landasi dengan banyaknya daerah yang memiliki sumber daya alam yang perlu digali dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti rekreasi keluarga, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Di sektor ini pula, di harapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada pendapatan utama daerah (PAD) melalui pajak, biaya parkir dan tiket, serta promosi wisata lainnya. (Girsang, 2021) Beberapa alasan di atas menggambarkan posisi strategis pariwisata dalam mendukung kehidupan perekonomian daerah. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang stabil membutuhkan perencanaan yang komprehensif (Mustaqin:2017). Isu Collaborative sangat menarik untuk di jadikan bahan kajian di Universitas Abdul Aziz Lamadjido (AZLAM) karena mayoritas mahasiswa berasal dari pelosok daerah yang ada di Sulawesi Tengah Seperti Parigi, Sigi, Donggala dan Poso.

Merujuk potensi wilayah pariwisata beberapa daerah di Sulawesi Tengah, tentunya memberikan indikasi yang nyata bahwa potensi Kawasan pariwisata harus di kelola dengan baik, salah satu alternative yang dapat di tawarkan adalah dengan merealisasikan konsep collaborative governance. Konsep ini menawarkan gagasan tentang pentingnya semangat kolaborasi di antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat setempat guna mencapai target yang diharapkan, atau bisa dilihat dari sebuah pengaturan dimana satu atau beberapa lembaga publik dan lembaga non-publik terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berlandaskan pada konsensus, dan menggunakan pertimbangan dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program-program atau aset publik (Ansell and Gash, 2007). Hal ini seiring dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18. Tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan pariwisata khususnya pada pasal 5 point D, menyebutkan bahwa seluruh potensi Pariwisata harus di kelola secara profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli Daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan.

Dari peraturan perundang-undangan di atas, jelas bahwa mendukung pariwisata sebagai faktor potensial dalam upaya pembangunan ekonomi memerlukan peran aktor di luar negara, seperti sektor swasta dan juga sektor publik. Kemitraan pengelolaan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah sangat membutuhkan kerja serius dari berbagai pihak

METODE PELAKSANAAN

Persoalan Prioritas Utama

Dengan melihat fenomena yang telah dijelaskan bahwa persoalan prioritas utama dari mitra adalah kurangnya pemahaman terkait konsepsi teoritis Collaborative Governance, keadaan ini merupakan hal yang perlu di perhatikan, karena tema kolaborasi antar aktor pemerintah adalah hal yang tidak bisa di hindari dalam prespektif New Public Services.

Metode Pendekatan

Tim pengabdian menggunakan metode tatap muka yakni dengan memberikan materi pokok bahasan berkaitan dengan konsepsi dasar Collaborative Governance, dalam hal ini kami akan memberikan dasar teoritis hingga studi- studi kasus penerapan konsep ini di beberapa negara. Kemudian, tim pengabdian melakukan pemantauan selama proses kegiatan berlangsung

bagi mitra yang belum paham mengenai materi bahasan, dengan mengarahkannya pada aspek yang belum dipahami, sehingga mitra dapat langsung mengetahui dan memahami materi serta tahapan yang diarahakan oleh pemateri. Materi akan disajikan melalui slide power point, gambar serta video sehingga mitra yang merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Birokrasi, Akuntabilitas Publik serta Kebijakan Publik mudah memahami dalam proses penyampaian materi.\

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung judul Edukasi Pentingnya Collaborative Governance Dalam Pengembangan Parawisata Lokal Pada Universitas Abdul Aziz Lamadjido (UNAZLAM) palu dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024. Pada kegiatan ini peserta yang merupakan mahasiswa berhasil memahami konsep dasar collaborative governance, termasuk pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui penyampaian studi kasus yang relevan oleh pemateri tentang daerah lain yang sukses mengimplementasikan model ini memberikan wawasan praktis bagi peserta.

Pada saat pelaksanaan, tim telah menyiapkan materi. Kegiatan diawali dengan sambutan ketua panitia untuk membuka kegiatan yang dilanjutkan oleh moderator untuk memandu acara hingga selesai. Selama kegiatan berlangsung mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, berbagi pandangan dan ide mengenai pariwisata lokal yang mengarah pada pengumpulan masukan dari peserta tentang tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan pariwisata di Palu.

Salah satu gagasan dalam forum diskusi yakni mengadakan festival budaya lokal yang dapat menarik wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Peserta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata lokal dan menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan hasil-hasil ini, kegiatan pengabdian di AZLAM Palu dapat menjadi model bagi institusi lain dalam mengimplementasikan collaborative governance untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesimpulan

1. Dalam konteks pengembangan pariwisata lokal, penerapan collaborative governance di Universitas Abdul Aziz Lamadjido (AZLAM) Palu menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku industri, sangat krusial.
2. Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga menciptakan solusi yang lebih efektif dan inovatif dalam mengembangkan pariwisata lokal.
3. Kerjasama yang erat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tren pariwisata, menjadikan pengembangan pariwisata lebih responsif dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni dan astuti. (2019). collaborative governance dalam pengelolaan keparawisataan yang berkelanjutan. Confrence on Public Administration and Society , 01, 1–27.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Girsang, K., Sibolga, A. K., Sumatera, P., Program, U., Manajemen, S., & Aparatur, S. (2021). Peranan dinas pariwisata dalam mengembangkan objek wisata air terjun sipitu-pitu di kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, 8.
- Irma Suryani, A. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. Pendidikan Geografi Sumatera Barat . Miles, M. B. & A. M. Hubberman. (1994). Qualitative data analysis: An expended.
- Miles, Matthew B, dan Huberman, A. Michael. 1992. Qualitative Data Analysis. (Terjemahan: Tjetjep Rohendi dengan judul: Analisis Data Kualitatif), UI-Press: Jakarta
- Mutaqin, A. Z. (2017). Pengembangan Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Tersedia pada: <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung, Tarsito, 1992 Silvia, Chris. 2011. Collaborative Governance Concepts for Succesful NetworkLeadership, State and Local Government Review. Vol. 43 (1). hal. 66-71. Diakses tanggal 22 Januari 2023. dari SAGE Publication.
- Slamet, Yulius. 2014. Study Kasus: Sebuah Pendekatan Penelitian Kualitatif. Solo Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. PrenadaMedia, sourcebook second edition. London: SAGE.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPusat dan Daerah.